

DAMPAK FENOMENA POLITIK UANG PADA PILKADA**Immanuel Silitonga¹, Hisar Siregar²**[¹](mailto:immanuel.silitonga@student.uhn.ac.id), [²](mailto:hisar.siregar@uhn.ac.id)**Universitas HKBP Nommensen Medan**

Abstract: *This study aims to analyze the Impact of Money Politics Phenomenon on Regional Elections. Regional Head Elections (PILKADA) are a form of democracy in the regional government system that allows people to directly elect leaders persuasively (not by force). Regional elections are part of the implementation of democracy at the local level that gives the people the right to determine the leader who will lead the government in their area. However, in practice, regional elections are often marred by various forms of violations, one of which is money politics. Money politics not only violates the principle of justice in elections, but also has the potential to produce incompetent leaders because their selection is not based on capability, but on financial ability. Money politics can be in the form of giving money or other goods to voters to influence the election results.*

Keywords: *Regional Head Elections, Money Politics.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Dampak Fenomena Politik Uang pada Pilkada. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan wujud demokrasi dalam sistem pemerintahan daerah yang memungkinkan masyarakat memilih pemimpin secara langsung secara persuasif (tidak memaksa). Pilkada merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal yang memberikan hak kepada rakyat untuk menentukan pemimpin yang akan memimpin pemerintahan di daerah mereka. Namun dalam praktiknya, Pilkada sering kali diwarnai oleh berbagai bentuk pelanggaran, salah satunya adalah politik uang (money politic). Politik uang tidak hanya mencederai prinsip keadilan dalam pemilu, tetapi juga berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten karena pemilihannya bukan berdasarkan kapabilitas, melainkan kemampuan finansial. Politik uang dapat berupa pemberian uang atau barang lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi hasil pemilihan.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Politik Uang.

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin daerah, Pilkada diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi politik mereka secara bebas dan bertanggung jawab¹. Namun, dalam praktiknya, proses demokratis ini sering kali diwarnai oleh berbagai masalah yang menggerogoti nilai-nilai demokrasi, salah satunya adalah praktik politik uang. Politik uang, atau yang sering disebut sebagai "money politics," telah menjadi fenomena yang mengakar dan sulit dihilangkan dalam proses pemilihan, termasuk Pilkada. Praktik ini tidak hanya merusak integritas proses pemilihan, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah.

Politik uang merujuk pada praktik pemberian uang, barang, atau bentuk imbalan lainnya kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi keputusan mereka dalam memberikan suara. Praktik ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pemberian langsung uang tunai, sembako, hingga janji-janji material yang disampaikan secara terselubung. Meskipun telah ada upaya penegakan hukum dan sosialisasi anti-politik uang, praktik ini tetap bertahan dan bahkan semakin berkembang dengan metode yang semakin canggih dan sulit dilacak. Hal ini menunjukkan bahwa politik uang bukan sekadar masalah moral individu, melainkan telah menjadi bagian dari sistem politik yang memerlukan pendekatan komprehensif untuk mengatasinya.

Dampak politik uang pada Pilkada tidak hanya terbatas pada proses pemilihan itu sendiri, tetapi juga memiliki implikasi jangka panjang terhadap pembangunan daerah². Pemimpin yang terpilih melalui praktik politik uang cenderung lebih fokus pada upaya mengembalikan "modal" yang telah dikeluarkan selama kampanye, daripada menjalankan program-program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan pembangunan yang tidak merata, korupsi, dan rendahnya akuntabilitas pemerintahan. Selain itu, politik uang juga dapat menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi politik, di mana calon pemimpin yang memiliki sumber daya finansial besar memiliki peluang lebih besar untuk menang, terlepas dari kualitas dan kapabilitas mereka. Fenomena politik uang dalam Pilkada juga mencerminkan adanya masalah struktural dalam sistem politik dan ekonomi di Indonesia. Ketimpangan ekonomi, rendahnya kesadaran politik masyarakat, serta lemahnya penegakan hukum menjadi faktor-faktor yang turut mendorong maraknya praktik ini. Di sisi lain, budaya patronase dan hubungan kekeluargaan yang kuat dalam masyarakat juga turut memengaruhi bagaimana politik uang dipraktikkan dan diterima oleh sebagian masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi politik uang tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga perubahan budaya dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dampak politik uang pada Pilkada, baik dari segi proses pemilihan maupun implikasi yang ditimbulkannya terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong maraknya politik uang, bentuk-bentuk praktik yang terjadi, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan pembangunan daerah. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk meminimalisir dampak negatif politik uang, baik melalui regulasi, pendidikan politik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya

¹ Muhtar, *Sejarah Pilkada di Indonesia*, Jakarta, 2024

² M. Qodari, "Politik Uang dan Demokrasi". RajaGrafindo Persada, 2019

meningkatkan kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. Dengan memahami secara komprehensif dampak politik uang pada Pilkada, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan dan strategi yang efektif untuk menciptakan proses pemilihan yang lebih bersih, transparan, dan berintegritas. Pada akhirnya, hal ini akan mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengangkat beberapa rumusan masalah akan di kaji dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mendorong maraknya praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)?
2. Sejauh mana kesadaran politik masyarakat dan tingkat pendidikan memengaruhi penerimaan terhadap politik uang?

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian dokumen hukum yang ada, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku, dan jurnal ilmiah. Metode ini tepat karena topik berfokus pada aspek hukum yang berlaku dalam proses likuidasi, serta peran dan tanggung jawab auditor di dalamnya.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data Primer:

Mencakup undang-undang, peraturan pilkada , serta peraturan perundang-undangan terkait dengan politik uang

Data Sekunder:

Meliputi literatur dan referensi lain seperti buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya tentang politik uang, peraturan BPK

b. Sumber Data

Sumber Data Primer

Peraturan-peraturan yang berlaku seperti UU Pilkada , peraturan BPK Peraturan bawaslu , dan UU lainnya yang terkait dengan pilkada dan politik uang

Sumber Data Sekunder:

Literatur dan hasil penelitian dari jurnal akademik, buku hukum, dan dokumen resmi yang menjelaskan aspek hukum tata negara ,hukum pidana tentang politik uang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah menjadi fenomena yang sulit dihilangkan dalam sistem demokrasi Indonesia. Politik uang, atau yang sering disebut sebagai "money politics," merujuk pada pemberian uang, barang, atau bentuk imbalan lainnya kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi keputusan mereka dalam memberikan suara³. Meskipun telah ada upaya penegakan hukum dan sosialisasi anti-politik uang, praktik ini tetap bertahan dan bahkan semakin berkembang dengan metode yang semakin canggih.

Untuk memahami mengapa politik uang masih marak terjadi dalam Pilkada, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong praktik ini. Faktor-faktor tersebut

³ M. Yamin, *Hukum dan Politik Uang*, Jakarta, Refika Aditama, 2020

dapat berasal dari aspek struktural, kultural, ekonomi, dan hukum. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang faktor-faktor tersebut:

1. Faktor Struktural

Ketimpangan Ekonomi Masyarakat di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi cenderung lebih rentan terhadap praktik politik uang. Keterbatasan ekonomi membuat mereka lebih mudah tergoda oleh imbalan materi yang ditawarkan oleh calon pemimpin. Sistem Politik yang Oligarki pada Pilkada sering kali didominasi oleh calon-calon yang memiliki kekuatan finansial besar. ⁴Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi politik, di mana calon dengan sumber daya terbatas sulit bersaing tanpa menggunakan praktik politik uang. Lemahnya Infrastruktur Politik: Kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif dan transparansi dalam proses pemilihan memudahkan terjadinya praktik politik uang.

2. Faktor Kultural

a) Budaya Patronase

Hubungan patron-klien yang kuat dalam masyarakat Indonesia, di mana pemilih merasa "berhutang budi" kepada calon yang memberikan bantuan, menjadi salah satu pendorong utama politik uang.⁵

b) Mentalitas Transaksional:

Sebagian masyarakat memandang Pilkada sebagai ajang transaksi, di mana suara mereka dapat "diperjualbelikan" dengan imbalan materi. Tingkat Pendidikan yang Rendah: Rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran politik masyarakat membuat mereka kurang memahami dampak negatif dari politik uang terhadap demokrasi dan pembangunan daerah.

3. Faktor Ekonomi

Biaya Kampanye yang Tinggi: Calon pemimpin sering kali mengeluarkan biaya besar untuk kampanye, termasuk biaya logistik, iklan, dan mobilisasi massa. Untuk menutupi biaya tersebut, mereka cenderung menggunakan cara-cara tidak sehat, termasuk politik uang. Keterbatasan Sumber Pendanaan: Calon pemimpin yang tidak memiliki akses ke sumber pendanaan yang legal dan transparan sering kali menggunakan cara-cara ilegal, seperti politik uang, untuk membiayai kampanye mereka.

4. Faktor Hukum dan Penegakan Hukum

Lemahnya Penegakan Hukum:

Meskipun telah ada regulasi yang melarang praktik politik uang, penegakan hukum sering kali lemah dan tidak konsisten. Hal ini menciptakan rasa impunitas di kalangan pelaku politik uang. Regulasi yang Tidak Komprehensif. Beberapa aturan tentang pendanaan kampanye dan batasan donasi masih belum jelas, sehingga memudahkan calon pemimpin untuk menyalahgunakan sistem.

Kurangnya Pengawasan: Lembaga pengawas pemilihan, seperti Bawaslu, sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya dan kewenangan dalam mengawasi praktik politik uang secara efektif.

5. Faktor Sosial-Politik

a. Partisipasi Masyarakat yang Rendah:

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan membuat calon pemimpin merasa perlu menggunakan politik uang untuk memobilisasi pemilih.

b. Polarisasi Politik:

⁴ M.Qodari, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Politik Uang di Indonesia*", Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2019

⁵ M.Qodari, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Politik Uang di Indonesia*", Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2019

Persaingan yang sangat ketat antar calon pemimpin sering kali mendorong mereka untuk menggunakan segala cara, termasuk politik uang, untuk memenangkan pemilihan.

Faktor-faktor di atas saling berkaitan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi maraknya praktik politik uang dalam Pilkada. Dampaknya tidak hanya merusak integritas proses pemilihan, tetapi juga menggerogoti kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah. Pemimpin yang terpilih melalui politik uang cenderung lebih fokus pada upaya mengembalikan "modal" yang telah dikeluarkan selama kampanye, daripada menjalankan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Penerimaan masyarakat terhadap praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak terjadi secara vakum, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kesadaran politik dan tingkat pendidikan. Kesadaran politik merujuk pada pemahaman masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam proses demokrasi, sementara tingkat pendidikan berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk berpikir kritis dan rasional dalam menanggapi isu-isu politik.⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana kedua faktor tersebut kesadaran politik dan tingkat pendidikan mempengaruhi sikap masyarakat terhadap politik uang. Apakah masyarakat dengan kesadaran politik yang tinggi dan tingkat pendidikan yang baik cenderung menolak politik uang, atau sebaliknya, apakah rendahnya kesadaran politik dan pendidikan membuat masyarakat lebih mudah menerima praktik ini.

1. Peran Kesadaran Politik dalam Menerima atau Menolak Politik Uang

Kesadaran politik masyarakat merupakan faktor kunci dalam menentukan sikap mereka terhadap politik uang. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan:

a) Pemahaman tentang Hak dan Tanggung Jawab Politik

Masyarakat dengan kesadaran politik yang tinggi cenderung memahami bahwa suara mereka adalah alat untuk memilih pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Mereka menyadari bahwa menerima politik uang hanya akan merugikan proses demokrasi dan pembangunan daerah dalam jangka panjang. Sebaliknya, masyarakat dengan kesadaran politik yang rendah mungkin memandang Pilkada sebagai ajang transaksi, di mana suara mereka dapat "diperjualbelikan" dengan imbalan materi.⁷

b) Kesadaran tentang Dampak Negatif Politik Uang

Masyarakat yang sadar politik biasanya lebih memahami dampak negatif dari politik uang, seperti korupsi, pembangunan yang tidak merata, dan rendahnya akuntabilitas pemimpin terpilih. Di sisi lain, masyarakat dengan kesadaran politik yang rendah mungkin tidak menyadari atau mengabaikan dampak tersebut, sehingga lebih mudah menerima politik uang.⁸

c) Partisipasi Politik yang Rasional

Kesadaran politik yang tinggi mendorong partisipasi politik yang rasional, di mana masyarakat memilih berdasarkan program dan visi calon pemimpin, bukan karena imbalan materi. Rendahnya kesadaran politik dapat menyebabkan partisipasi yang bersifat transaksional, di mana suara diberikan sebagai balasan atas pemberian uang atau barang.

2. Peran Tingkat Pendidikan dalam Menerima atau Menolak Politik Uang

Tingkat pendidikan masyarakat juga memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap mereka terhadap politik uang. Berikut adalah penjelasannya:

⁶ M.Qodari, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Politik Uang di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2019

⁷ M. Amin Djamaluddin, "Peran Kesadaran Masyarakat dalam Menolak Politik Uang", Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2018

⁸ M. Qodari, *Kesadaran Politik dan Penolakan terhadap Politik Uang*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2019.

a) Kemampuan Berpikir Kritis

Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi cenderung memiliki kemampuan berpikir kritis yang lebih baik. Mereka mampu menganalisis dampak jangka panjang dari politik uang dan membuat keputusan yang rasional dalam memilih pemimpin. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah mungkin kurang mampu berpikir kritis, sehingga lebih mudah terpengaruh oleh imbalan materi yang ditawarkan.

b) Pemahaman tentang Nilai-Nilai Demokrasi

Pendidikan yang baik biasanya mencakup pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi, seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini membuat masyarakat lebih cenderung menolak praktik politik uang yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi, sehingga masyarakat lebih mudah menerima politik uang.

c) Kesadaran tentang Hak-Hak Politik

Masyarakat yang berpendidikan tinggi biasanya lebih menyadari hak-hak politik mereka, termasuk hak untuk memilih pemimpin yang berkualitas tanpa dipengaruhi oleh imbalan materi. Di sisi lain, masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah mungkin kurang menyadari hak-hak tersebut, sehingga lebih rentan terhadap praktik politik uang.

3. Interaksi antara Kesadaran Politik dan Tingkat Pendidikan

Kesadaran politik dan tingkat pendidikan sering kali saling berkaitan dan saling memperkuat. Masyarakat yang berpendidikan tinggi cenderung memiliki kesadaran politik yang lebih baik, dan sebaliknya. Namun, ada beberapa skenario yang perlu diperhatikan:

a) Masyarakat Berpendidikan Tinggi tetapi Kesadaran Politik Rendah:

Meskipun berpendidikan tinggi, jika kesadaran politik rendah, masyarakat mungkin tetap rentan terhadap politik uang karena kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi.

b) Masyarakat Berpendidikan Rendah tetapi Kesadaran Politik Tinggi:

Meskipun tingkat pendidikan rendah, jika kesadaran politik tinggi, masyarakat mungkin tetap menolak politik uang karena memahami dampak negatifnya. Dengan memahami sejauh mana kesadaran politik dan tingkat pendidikan memengaruhi penerimaan terhadap politik uang, dapat dirumuskan strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi praktik politik uang. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

a) Pendidikan Politik:

Meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui program pendidikan dan sosialisasi tentang nilai-nilai demokrasi.

b) Peningkatan Akses Pendidikan

Memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas, sehingga mereka dapat berpikir kritis dan rasional dalam menanggapi isu-isu politik.

c) Kampanye Anti-Politik Uang:

Melakukan kampanye yang menekankan dampak negatif politik uang dan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan integritas dan program.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa dampak dari politik uang sangat merugikan masyarakat dalam berbagai hal. Maka negara perlu melakukan penegakan hukum yang tegas. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dari politik uang kepada masyarakat tetapi terlepas dari peran pemerintah dalam menanggulangi politik uang, masyarakat juga perlu ikut ambil bagian dalam pencegahan politik uang dengan menanamkan prinsip anti politik uang dalam diri sendiri. Maka kasus politik tidak terus terulang.

Saran

1. Di perlukannya penegakan hukum yang kuat dari pemerintah yang dapat menimbulkan efek jera pada pelaku, agar kasus ini tidak berulang
2. Diperlukannya pengawasan yang aktif dan ketat dari pemerintah maupun lembaga bawaslu sebagai lembaga yang bertanggung jawab.
3. Diperlukannya peran dari pihak-pihak terkait, terutama masyarakat untuk menanamkan rasa nasionalisme anti politik uang dan memberikan suaranya secara jujur tanpa paksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Amin Djamaluddin, *Peran Kesadaran Masyarakat dalam Menolak Politik Uang*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2018
- M. Qodari, *"Politik Uang dan Demokrasi"*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2019
- M. Qodari, *Kesadaran Politik dan Penolakan terhadap Politik Uang*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2019.
- M. Yamin, *Hukum dan Politik Uang*, Jakarta, Refika Aditama, 2020
- M. Qodari, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Politik Uang di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2019
- Muhtar, *Sejarah Pilkada di Indonesia*, Jakarta, 2024